

PERENCANAAN TATA KELOLA KAWASAN KUMUH BERBASIS GIS (*GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM*) DI KELURAHAN KALAYAN BARAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN KOTA BANJARMASIN.

GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) BASED GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) GOVERNANCE PLANNING IN KELURAHAN KALAYAN BARAT, BANJARMASIN SELATAN DISTRICT, BANJARMASIN CITY.

Halilullah¹, Adhi Surya², Hendra Cahyadi³

¹Teknik Sipil, 22201, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM.16640059

²Teknik Sipil, 22201, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIK.061104620

³Teknik Sipil, 22201, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIP.197710112005011001

Email:halilullah837@gmail.com

ABSTRAK

Kecenderungan perkembangan wilayah di Indonesia di cirikan dengan pertumbuhan penduduk seperti halnya Negara-negara berkembang lainnya berlangsung dengan sangat pesat. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini mempunyai implikasi yaitu meningkatnya tuntutan penyediaan sarana dan prasarana yang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya akan meningkat pula. Perlu disadari bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh daerah perkotaan maupun pedesaan, dimana ketersediaan dan tingkat pelayanan sarana dan prasarana masih terbatas dan belum secara merata dapat menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat, ini ditandai dengan meningkatnya konsentrasi lingkungan permukiman yang sering tidak diikuti dengan meningkatnya sarana dan prasarana penunjang permukiman. Sejalan dengan terus terjadinya perkembangan tersebut maka pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan akan sarana dan prasarana khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Berkembangnya suatu lingkungan permukiman tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk baik karena faktor pertumbuhan penduduk itu sendiri maupun karena faktor terjadinya urbanisasi.

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi tingkat kekumuhan di Kelurahan Kalayan Barat, memetakan kawasan kumuh memakai metode (GIS) *Geographic Information System*. Serta memberikan solusi dan strategi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kalayan Barat.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan cara mengidentifikasi Kawasan kumuh untuk memberi pembobotan skor penilaian pada Kawasan yang diteliti lalu memetakannya dengan *software Arcgis* sehingga dapat diketahui pemukiman tersebut masuk dalam kriteria kumuh ringan, sedang atau berat sehingga dapat mengambil langkah strategi untuk penanganannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari hasil identifikasi Kawasan mengacu pada 3 indikator yang telah di tentukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Kelurahan Kalayan Barat memiliki tingkat kekumuhan dengan kumuh sedang yang memiliki rentan masalah tertinggi di bagian aspek jalan lingkungan, drainase, serta proteksi kebakaran yang belum maksimal di rasakan masyarakat sekitar. Dari hasil pemetaan Kawasan permukiman dengan metode GIS (*Geographic Information System*) di peroleh 9 peta di Kelurahan Kalayan Barat Kota Banjarmasin yang telah di observasi dan di identifikasi sebelumnya. Dari hasil identifikasi dan pemetaan, dapat di berikan solusi mengenai masalah terhadap tingkat kekumuhan yang ada pada di Kelurahan Kalayan Barat berupa peremajaan prasarana dan sarana pada masing-masing RT di Kelurahan Kalayan Barat Kota Banjarmasin.

Kata Kunci : Identifikasi Kawasan Pemukiman Kumuh, *Geografic Information System*, *ArcGis*

ABSTRACT

The pattern of territorial advancement in Indonesia is portrayed by populace development as well as other emerging nations that happen quickly. This extremely quick populace development has suggestions, to be specific the expanding requests for the arrangement of offices and foundation both as far as quality and amount will likewise increment. has not had the option to arrive at all degrees of society equitably, this is shown by the expanding centralization of the private climate which is frequently not followed by an increment in supporting offices and framework for settlements. In accordance with these turns of events, the public authority should be receptive to the requirement for offices and framework, particularly to meet the essential necessities of the local area. The improvement of a private climate can't be isolated from the fast pace of populace development, both because of the populace development factor itself and because of the element of urbanization.

The reason for this study was to recognize the degree of ghettos in the Kelurahan Kalayan Barat, to plan the ghetto region utilizing the Geographic Data Framework (GIS) technique. As well as giving arrangements and systems to taking care of ghetto settlements in West Kalayan Village. The sort of information utilized in this study comprised of essential and optional data. The research strategy utilized is by distinguishing ghetto regions to give

a weighted appraisal score to the area under concentrate and afterward planning it with Arcgis programming so it tends to be seen that the settlement is remembered for the measures for light, moderate or serious ghettos so essential advances can be taken to manage it.

The outcomes showed that from the aftereffects of the recognizable proof of the area alluding to the 3 markers that not entirely settled, it very well may be reasoned that the Kalayan Barat Town has a degree of ghettos with moderate ghettos which have the most elevated issue inclined perspectives as far as natural streets, seepage, and fire security viewpoints that poor person been amplified nearby. feel the encompassing community. From the consequences of planning the settlement region utilizing the GIS (Geographic Data Framework) strategy, 9 guides were gotten in the West Kalayan Town, Banjarmasin City which had been recently noticed and identified. From the aftereffects of recognizable proof and planning, an answer can be given in regards to the issue of the degree of ghettos in the West Kalayan Town through reviving the foundation and offices in each RT in the West Kalayan Town, Banjarmasin City.

Keywords: *Identification of Slum Areas, Geographic Information System, ArcGis*

PENDAHULUAN

Pola peningkatan provinsi di Indonesia digambarkan dengan perkembangan penduduk serta negara-negara berkembang lainnya yang terjadi dengan cepat. Perkembangan penduduk yang sangat pesat ini memiliki saran, khususnya minat yang meningkat untuk pendirian kantor dan yayasan baik dari segi kualitas maupun jumlah juga akan meningkat. belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat secara merata, hal ini ditandai dengan berkembangnya pengelompokan iklim privat yang sering tidak diikuti dengan perluasan kantor-kantor pendukung dan kerangka permukiman. Sesuai dengan pergantian peristiwa ini, otoritas publik harus menerima persyaratan untuk kantor dan kerangka kerja, terutama untuk memenuhi kebutuhan penting daerah setempat. Kemajuan iklim privat tidak dapat dipisahkan dari laju pembangunan penduduk yang cepat, baik dilihat dari faktor pembangunan penduduk itu sendiri maupun karena unsur urbanisasi.

Dampak negatif urbanisasi yang masih berlangsung hingga saat ini lebih disebabkan oleh ketidakteraturan posisi terbuka di negara terbuka atau di luar kota sehingga individu di luar kota lari ke kota dengan harapan menemukan jalur baru. bekerja, ini yaitu tempat di mana berbagai masalah muncul di wilayah metropolitan. salah satunya yaitu maraknya permukiman ghetto karena tidak adanya aksesibilitas lahan. Seiring dengan perkembangan penduduk di suatu ruang, kebutuhan akan penataan kerangka dan permukiman juga akan meningkat, baik melalui perombakan atau pergantian peristiwa baru. Kemajuan berbasis kawasan lokal di bidang penginapan telah lama mendapat perhatian para ilmuwan di Indonesia.

Di Indonesia, penurunan sifat iklim pedesaan dan penginapan metropolitan sering ditemukan di daerah padat penduduk, seperti daerah ghetto metropolitan. Pemanfaatan lahan yang ideal, jenis struktur yang berantakan, kantor dan kerangka alam yang tidak memadai yakni indikasi penurunan ini. Upaya yang berbeda harus dilakukan untuk desain metodologi yang komprehensif, peningkatan sifat iklim pribadi yang telah dilakukan meliputi: desain ulang rumah, bantuan khusus, rumah uji, peningkatan kota yang menggabungkan kerangka jalan dan saluran, peningkatan desinfeksi, penataan kantor jamban, tempat sampah, dan penyediaan air bersih. Program ini ditopang oleh gagasan Kepala Jenderal Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya 100 - 0 - 100 yang berencana menangani sifat permukiman seperti air bersih, permukiman ghetto dan sterilisasi. Pentingnya menjaga masalah alam, salah satunya yaitu penanganan permukiman ghetto, sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Permukiman dan Kawasan Permukiman bahwa tindakan penginapan dan permukiman memiliki tujuan antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan tempat tinggal sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia dalam rangka memperluas dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan pemerintah;
2. Mengakui penginapan dan pemukiman yang layak dalam iklim yang kokoh, terlindungi, menyenangkan dan terorganisir. Masalah alam pribadi yang tergolong malang juga dikenal luas mengenai Kota Kalayan Barat, penyebab utamanya sama dengan di kota-kota kecil lainnya di Indonesia dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Sebuah. Dimiliki oleh penduduk yang padat dan padat, baik karena perkembangan penduduk karena kelahiran maupun karena urbanisasi.
 - b. B. Dimiliki oleh individu yang memiliki gaji rendah dan tidak tahan lama, atau menghasilkan subsistem yang hidup di bawah garis kemiskinan.

- c. C. Kelemahan kronis dan kondisi sterilisasi, biasanya digambarkan oleh iklim aktual yang kotor dan penyebaran infeksi yang tak tertahankan.
- d. D. Kekurangan administrasi kota seperti air bersih, kantor jamban, listrik, dll.
- e. Pengembangan dadakan sehingga penampilan aslinya tidak biasa dan diabaikan; jalan ramping, tidak ada teras, dll.
- f. F. Kekuatan cara hidup "provinsi" konvensional.
- g. G. Terisolasi secara sosial dari permukiman berbagai lapisan masyarakat.
- h. H. Salah terlibat atau kabur (berbahaya) status sah tanah.

Secara umum digambarkan dengan banyak sekali perilaku yang merosot dan demonstrasi kriminal. Kota Kalayan Barat yakni salah satu kawasan ghetto yang ada di Kota Banjarmasin. Keadaan permukiman ghetto di Kota Kalayan Barat, sebenarnya sudah ada cukup lama, namun karena tidak adanya pertimbangan dari otoritas publik, kawasan ghetto di Kota Kalayan Barat tidak menetap. Unsur-unsur atau permasalahan Permukiman Ghetto di Kota Kalayan Barat yaitu permasalahan pada kantor dan yayasan ekologi, misalnya penginapan dengan kondisi penginapan yang tidak diinginkan, baik penerangan, udara maupun toilet.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif yang dapat diuraikan sebagai berikut: Data kualitatif yaitu data yang berbentuk bukan angka atau menjelaskan secara deskriptif mengenai lokasi penelitian secara umum yaitu Data Kondisi fisik wilayah, yang mencakup letak geografis, kondisi topografi, kelerengan, geologi dan hidrologi. Data Pola penggunaan lahan, mencakup pola penggunaan lahan Kelurahan Kalayan Barat. Dan Data Karakteristik Wilayah Permukiman dan Data kuantitatif yaitu data yang menjelaskan kondisi lokasi penelitian dengan tabulasi angka yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui nilai yang diinginkan. Data kuantitatif yang dimaksud yaitu: Data demografi, Data jumlah ketersediaan sarana dan prasarana, jumlah pemakaian air bersih, Data jumlah bangunan yang memiliki persyaratan administrasi bangunan (IMB) dan Data jumlah bangunan yang memiliki status tanah legal dan ilegal atau *squatters*.

Adapun sumber data yang digunakan, digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut Observasi Lapangan dan Wawancara. Adapun metode analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan sesuai dengan rumusan masalah, maka ada beberapa alat analisis yang digunakan, yaitu: Analisis Kuantitatif dan Analisis SWOT

PEMBAHASAN

A. Hasil Identifikasi Permukiman Di Kelurahan Kalayan Barat.

1. Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Kalayan Barat.

a. Variabel 1

Penilaian kekumuhan secara fisik terdiri dari 7 indikator yaitu :

1) Kondisi bangunan

a. Keteraturan Bangunan

Sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan, dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk tapak. 40 % Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Nilai Bobot 1).

b. Kepadatan Bangunan

Lokasi memiliki kepadatan bangunan yang tinggi, yaitu tingginya jumlah bangunan per hektar. Kepadatan Bangunan Sebesar 250 Unit/Ha (Nilai Bobot 1).

c. Persyaratan Teknis

Sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis, khususnya persyaratan teknis untuk hunian sederhana. 16 % Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Nilai Bobot 1).

Grafik 1
Kondisi Bangunan



Sumber : Hasil Analisis Data Tingkat Kekumuhan.

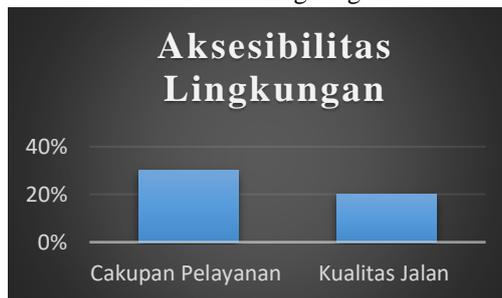
Gambar 1
Kondisi Sempadan dan keteraturan Bangunan di lokasi penelitian



(Sumber : Survei Lapangan 2021).

- 2) Kondisi Jalan Lingkungan
 - a. Cakupan Layanan
Cakupan pelayanan jalan lingkungan memadai terhadap luas area, artinya 4ebagian besar lokasi terlayani jalan lingkungan. Cakupan Layanan Jalan Lingkungan Tidak Memadai Di 20% Luas Area (Nilai Bobot 1).
 - b. Kualitas Jalan
Sebagian kualitas jalan lingkungan yang ada kondisinya buruk. Kualitas Jalan Buruk pada 25 % Luas Area (Nilai Bobot 1).

Grafik 2
Aksesibilitas lingkungan



Sumber : Hasil Analisis Data Tingkat Kekumuhan

Gambar .2
Kepadatan Bangunan di lokasi penelitian



(Sumber : Survei Lapangan 2021).

3) Kondisi Drainase Lingkungan

a. Cakupan Pelayanan

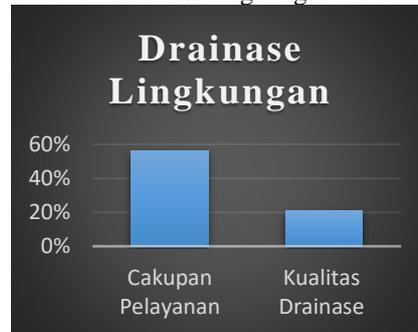
56% jaringan drainase belum cukup memadai terhadap Lingkungan Kelurahan Kalayan Barat. (nilai bobot 3).

b. Kualitas Drainase

21 % jaringan drainase yang kondisinya buruk dan belum terlayani terhadap luas area di kawasan penelitian.(Nilai Bobot 1)

Grafik 3

Drainase lingkungan



Sumber : Hasil Analisis Data Tingkat Kekumuhan.

Gambar 3

Kondisi Drainase Lingkungan Kelurahan Kalayan Barat.



(Sumber : Survei Lapangan 2021)

4) Kondisi Penyediaan Air Bersih

a. Persyaratan Teknis

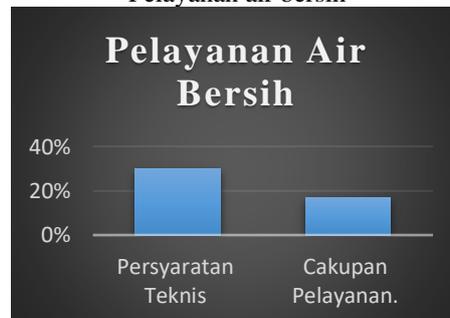
Sebagian besar luas area memiliki sistem penyediaan air minum yang tidak memenuhi persyaratan teknis. SPAM Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 30% Luas Area (Nilai Bobot 1).

b. Cakupan Pelayanan

Pelayanan penyediaan air minum yang ada tidak memadai terhadap populasi. Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 17% populasi (Nilai Bobot 1).

Grafik 4

Pelayanan air bersih



Sumber : Hasil Analisis Data Tingkat Kekumuhan.

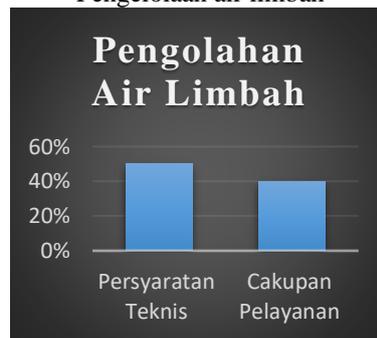
Gambar 4
Pelayanan air bersih



(Sumber : Survei Lapangan 2021)

- 5) Kondisi Pengelolaan Air Limbah
- Persyaratan Teknis Sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 50% luas area (Nilai Bobot 1).
 - Cakupan Layanan Sebagian besar luas area memiliki system pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 40% populasi (Nilai Bobot 1).

Grafik .5
Pengelolaan air limbah



Sumber : Hasil Analisis Data Tingkat Kekumuhan.

Gambar .5
Kondisi Pengelolaan air limbah di lokasi penelitian



(Sumber : Survei Lapangan 2021)

- 6) Kondisi Pengelolaan Persampahan
- Persyaratan Teknis
Sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 45%-70% luas area. Cakupan Pelayanan. (Nilai Bobot 1).
 - Cakupan pelayanan
pengolahan air limbah yang ada tidak memadai terhadap populasi. Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 40 % populasi (Nilai Bobot 1).

Grafik 6
Pengelolaan persampahan

Sumber : Hasil Analisis Data Tingkat Kekumuhan.

Gambar .6
Pengelolaan persampahan



(Sumber : Survei Lapangan 2021)

7) Kondisi Pengamanan Kebakaran

a. Persyaratan Teknis

Sebagian besar luas area memiliki pasokan air untuk pemadaman yang tidak memadai. Pasokan Air Damkar Tidak Memadai Di 0,13 % Luas Area (Nilai Bobot1).

b. Cakupan Pelayanan

Sebagian besar luas area memiliki jalan lingkungan yang tidak memadai untuk mobil pemadam kebakaran. Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 100 % luas area (Nilai Bobot 5).

Grafik .7
Proteksi Kebakaran



Sumber : Hasil Analisis Data Tingkat Kekumuhan.

Gambar 7
Proteksi kerbakaran



(Sumber : Survei Lapangan 2021)

2. Variabel 2

Pertimbangan Lain Terdiri Dari 5 Indikator Yaitu

- a. Nilai Strategis Lokasi
Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah, artinya keberadaan lokasi mendukung fungsi tertentu dalam konstelasi kawasan/wilayah. Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah (Nilai Bobot 5).
- b. Kepadatan penduduk
Lokasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, artinya jumlah penduduk/Ha pada lokasi relatif tinggi sesuai. Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 341 jiwa/Ha (Nilai Bobot 5).
- c. Potensi Sosial Ekonomi
Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan, artinya pada lokasi terdapat potensi kegiatan ekonomi seperti pengolahan hasil sungai dan perdagangan. Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan (Nilai Bobot 5).
- d. Dukungan Masyarakat
Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi, artinya masyarakat mendukung program penanganan bahkan berperan aktif sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam pelaksanaan fisik. Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi (Nilai Bobot 5).
- e. Komitmen Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi dalam penanganan lokasi kumuh. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan fisik sarana prasarana di lokasi (Nilai Bobot 5).

3. Variabel 3

Penilaian Legalitas Lahan Terdiri Dari 3 Indikator Yaitu

- a. Aspek Status Lahan
Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal) (Nilai Bobot +1)
- b. Kesesuaian RTR
Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang (RTR). (Nilai Bobot +1).
- c. Persyaratan Administrasi Bangunan.
Di Kawasan penelitian sebagian bangunan pada lokasi belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). (Nilai Bobot -1).

. Pembobotan Hasil Identifikasi Kawasan Permukiman.

Pada tabel 1 berikut ini yaitu hasil dari Analisa perhitungan kekumuhan. Analisa perhitungan dapat di lihat di daftar lampiran.

Tabel .1 Analisis Pembobotan Kawasan Permukiman Kumuh

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KEKUMUHAN			
Aspek	Kriteria	Indikator	Nilai
1. Kondisi Bangunan	a. Keteraturan Bangunan	25 % - 50 % Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan	1
	b. Kepadatan Bangunan	Untuk Kota Metro & Kota Besar -Kepadatan Bangunan sebesar 250 Unit/Ha	3
	c. Persyaratan Teknis	25% - 50% Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	1
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	Cakupan Layanan Jalan Lingkungan Tidak Memadai di 25% - 50% Luas Area	1
	b. Kualitas	Kualitas Jalan Buruk pada 51% - 75%	3
3. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Persyaratan Teknis	Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengatasi Genangan Minimal di 76% - 100% Luas Area	5
	b. Cakupan Pelayanan	76% - 100% Luas Area Tidak Terlayani Drainase Lingkungan	5

4. Kondisi Penyediaan Air Bersih	a. Persyaratan Teknis	SPAM Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 51% - 75% Luas Area	3
	b. Cakupan Pelayanan	Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 51% - 75% populasi	3
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Persyaratan Teknis	Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 25% - 50% Luas Area	1
	b. Cakupan Pelayanan	Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 25% - 50% populasi	1
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Persyaratan Teknis	Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 51% - 75% Luas Area	3
	b. Cakupan Pelayanan	Cakupan Pengelolaan Persampahan Tidak Memadai terhadap 51% - 75% Populasi	3
7. Kondisi Pengamanan Kebakaran	a. Persyaratan Teknis	Pasokan Air Damkar Tidak Memadai di 25% - 50% Luas Area	1
	b. Cakupan Pelayanan	Jalan Lingkungan untuk Mobil Damkar Tidak Memadai di 76% - 100% Luas Area	5
JUMLAH NILAI BOBOT			35

B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN (DAPAT DITENTUKAN LAIN OLEH PEMDA ATAS BERBAGAI PERTIMBANGAN NON FISIK)

Aspek	Kriteria	Indikator	Nilai
	1. Nilai Strategis Lokasi	Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah	5
	2. Kepadatan Penduduk	Untuk Kota Sedang & Kecil - Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 341 Jiwa/Ha	5
	3. Potensi Sosial Ekonomi	Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan	5
	4. Dukungan Masyarakat	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi	5
	5. Komitmen Pemda	Komitmen Penanganan Oleh Pemda Tinggi	5

C. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN

Aspek	Kriteria	Indikator	Nilai
	1. Status Tanah	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)	+1
	2. Kesesuaian RTR	Keseluruhan lokasi berada pada Zona Permukiman sesuai RTR (sesuai)	+1
	3. Persyaratan Administrasi Bangunan	Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi belum memiliki IMB	-1

Sumber : Hasil Analisis Data Tingkat Kekumuhan.

Tabel .2
Formula Penilaian

1.	Tingkat Kekumuhan	= Total Nilai A
2.	Pertimbangan Lain	= Total Nilai B
3.	Legalitas Lahan	= Total Nilai C

Sumber : Hasil Analisis Data Tingkat Kekumuhan.

Tabel .3
Penjabaran Formula Penilaian

Nilai	Keterangan
TINGKAT KEKUMUHAN (A)	
15-34	Kumuh Ringan
35-54	Kumuh Sedang
55-75	Kumuh Berat
PERTIMBANGAN LAIN (B)	
5-11	Pertimbangan Lain Rendah
12-18	Pertimbangan Lain Sedang
19-25	Pertimbangan Lain Tinggi
LEGALITAS LAHAN (C)	
(+1)	Status Lahan Legal

Sumber : Hasil Analisis Data Tingkat Kekumuhan.

Tabel 4
Hasil Formula Penilaian (Skoring) Kawasan Kumuh Di Kelurahan Kalayan Barat.

Nilai	Keterangan	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI												
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B1	B2	B3	B4	B5	C
Tingkat Kekumuhan (Total Nilai A)														
35-54	Kumuh Sedang	3	4	10	6	2	6	6						
Pertimbangan Lain (Total Nilai B)														
19-25	Pertimbangan Lain Tinggi								5	5	5	5	5	
Legalitas Lahan (Total Nilai C)														
(+1)	Status Lahan Legal													+1
JUMLAH		3	4	10	6	2	6	6	5	5	5	5	5	+1
TOTAL JUMLAH		37					25					+1		

Sumber : Hasil Analisis Data Tingkat Kekumuhan.

Melalui identifikasi permasalahan kekumuhan, maka akan diperoleh basis data kondisi kualitas bangunan dan infrastruktur yang diindikasikan termasuk dalam kategori dengan klasifikasi kekumuhan di wilayah studi. Berdasarkan hasil analisis tabel penilaian di kawasan permukiman pada wilayah studi bahwa tingkat kekumuhannya yaitu kumuh Sedang dengan bobot penilaian tingkat kekumuhan 35, pertimbangan lain dengan nilai 25 dan legalitas lahan yaitu (+1)

B Pemetaan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Kalayan Barat

Peta hasil identifikasi kawasan permukiman Kelurahan Kalayan Barat.

berikut ini yaitu peta dari hasil pengolahan melalui software *Arcgis* sehingga diharapkan dapat memberikan Informasi berupa letak dan bentuk geografis dari lokasi penelitian, Dalam penelitian ini ada 9 peta yang di sajikan.

C. Analisis SWOT

1. Hasil Analisis SWOT

Tabel .6
Hasil SWOT

Internal	Kekuatan (Strenght)	Kelemahan (Weakneses)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebagian Besar Bangunan yang ada di lokasi penelitian sudah memenuhi kriteria keteraturan bangunan b. Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi terutama jasa dan perdagangan c. Kepadatan bangunan dilokasi masuk dalam kategori kepadatan yang sedang d. Bangunan di lokasi penelitian memenuhi persyaratan teknis bangunan e. Cakupan pelayanan jalan lingkungan sudah memadai f. Pengelolaan air limbah sudah memenuhi persyaratan teknis g. Cakupan pelayanan air limbah sudah memadai h. Pasokan air DAMKAR sudah memadai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Drainase lingkungan tidak memenuhi persyaratan teknis b. Drainase tidak mencakup sebagian besar wilayah lokasi penelitian c. Jalan lingkungan tidak memenuhi kriteria standar untuk mobil DAMKAR
Eksternal	Strategi S-O	Strategi W-O
Peluang (Opportunity)		
<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian terletak pada fungsi strategis kawasan b. Banyaknya investor tertarik pada pengelolaan kawasan strategis c. Tersedianya anggaran pemerintah untuk penangan kumuh d. Kesesuaian RTR yaitu lokasi peruntukan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang mencakup sebagian besar area b. Keteraturan bangunan mendukung pelaksanaan penataan pemukiman sesuai RTR 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan aturan mengenai pengelolaan kawasan kumuh
Ancaman (Threats)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ul style="list-style-type: none"> a. Bencana kebakaran pada lokasi dengan kepadatan penduduk yang tinggi b. Persaingan produktifitas ekonomi dengan wilayah lain 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepadatan bangunan yang rendah dapat mencegah terjadinya bencana kebakaran b. Pasokan air DAMKAR yang memadai untuk mengatasi jika terjadi bencana kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi jalan yang tidak memenuhi kriteria jalan untuk mobil DAMKAR b. menghambat penanggulangan bencana kebakaran c. Drainase yang buruk menciptakan lingkungan yang tidak sehat sehingga berdampak pada produktivitas ekonomi.

Sumber : Hasil Survey 2021

2. Konsep Strategi Penanganan Dan Penataan Kawasan Permukiman

Model Pendekatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Fisik) Berdasarkan tabel 4.5 model penataan kawasan permukiman kumuh yaitu model peremajaan. Model peremajaan terpilih sebagai alternative berdasarkan pertimbangan tiga aspek yaitu kekumuhan, pertimbangan lain dan legalitas lahan.

Tabel.7

Model Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Kekumuhan	Pertimbangan Lain	Legalitas Lahan	Penataan
Berat	Tinggi	Legal	Pemukiman Kembali atau Peremajaan
Berat	Sedang	Legal	
Berat	Rendah	Legal	
Berat	Tinggi	Ilegal	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Berat	Sedang	Ilegal	
Berat	Rendah	Ilegal	
Sedang	Tinggi	Legal	Peremajaan
Sedang	Sedang	Legal	
Sedang	Rendah	Legal	
Sedang	Tinggi	Ilegal	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Sedang	Sedang	Ilegal	
Sedang	Rendah	Ilegal	
Ringan	Tinggi	Legal	Pemugaran
Ringan	Sedang	Legal	
Ringan	Rendah	Legal	
Ringan	Tinggi	Ilegal	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Ringan	Sedang	Ilegal	
Berat	Rendah	legal	

*Sumber : Hasil Analisis Data Tingkat Kekumuhan.***PENUTUP**

1. Dari hasil identifikasi Kawasan mengacu pada 3 indikator yang telah di tentukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Kelurahan Kalayan Barat memiliki tingkat kekumuhan dengan kumuh sedang yang memiliki rentan masalah tertinggi di bagian aspek jalan lingkungan, drainase, serta proteksi kebakaran yang belum maksimal di rasakan masyarakat sekitar.
2. Dari hasil pemetaan Kawasan permukiman dengan metode GIS (*Geographic Information System*) di peroleh 9 peta di Kelurahan Kalayan Barat Kota Banjarmasin yang telah di observasi dan di identifikasi sebelumnya.
3. Dari hasil identifikasi dan pemetaan, dapat di berikan solusi mengenai masalah terhadap tingkat kekumuhan yang ada pada di Kelurahan Kalayan Barat berupa peremajaan prasarana dan sarana pada masing-masing RT di Kelurahan Kalayan Barat Kota Banjarmasin.

REFERENSI

- Bayu Arifianto Muhammad dan Haryo Sulistyarso, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), 2016. Arahana Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kecamatan Kenjeran dengan Pendekatan Eco-Settlements JURNAL TEKNIK ITS Vol.5, No.2, (2016). ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print).
- Cut Suciatina Silvia, Prodi Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Teuku Umar, 2017. Identifikasi Karakteristik Dan Pemetaan Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan, Vol.3 No.4 April 2017, ISSN : 2304 – 1190.
- Dini Solehati, Mirza Irwansyah, Irin Caisarina. Mahasiswa Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala. 2017. Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Gampong Telaga Tujuh Berbasis GIS, Kota Langsa, Aceh, Jurnal Teknik Sipil ISSN 2088-9321 Universitas Syiah Kuala, Volume 1 Special Issue, Nomor 2, Desember, 2017. ISSN : e-2502-5295.
- Dwi Kurniasih, Ira Mentayani, Lilis Hartati, Zainal Abidin Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, 2019. Penataan Permukiman Kumuh Kawasan 1 Kota Banjarmasin Kuin Utara-Alalak Selatan-Alalak Tengah-Alalak Tengah. JURNAL ULM Vol.15, No.3 (2019) ISSN: 1978-8096.
- Elpidia Agatha Crysta dan Yanto Budisusanto, Departemen Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 2017. Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat RT Di Kelurahan Keputih Kota Surabaya, JURNAL TEKNIK ITS Vol.6, No.2 (2017), 2337-3520 (2301-928X).

- AFerry Sobatnu, Faris Ade Irawan, Agus Salim, Dosen Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin, 2017. Identifikasi Dan Pemetaan Morfometri Daerah Aliran Sungai Martapura Memakai Teknologi GIS. *Jurnal GRADASI TEKNIK SIPIL* Volume 1, No.2, 2017 ISSN 2598-9758 (Print) ISSN 2598-8581 (Online).
- Hafsah Fatihul Ilmy, Yanto Budisusanto, Jurusan Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 2017. Identifikasi Penentuan Prioritas Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Memakai Metode AHP (Analytical Hierarchy Process), *JURNAL TEKNIK ITS* Vol.6, No.1, (2017). ISSN: 2337-3539.
- Jekson Koterisa, Windy Mononimbar, Verry Lahamendu, Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado 2 & 3 Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado 2018. Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Bantaran Sungai Ampera Kelurahan Kaibus Kabupaten Sorong Selatan, *Jurnal Spasial* Vol 5, No.2, 2018, ISSN 2442 3262.
- Mirza Sofyan, M. Isya, Renni Anggraini, Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, 2017. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (Sig) Untuk Prioritas Penanganan Jalan Di Kabupaten Aceh Besar, Volume 1 Special Issue, Nomor 1, September 2017. *Jurnal Teknik Sipil* ISSN : 2088-932.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 Mengenai Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, Jakarta 121 Hal.
- T.K. Sendow, Jefferson Longdong, Dosen Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, 2014. Studi pemetaan peta kota (Studi kasus Kota Manado), *Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING* Vol.2, No.1, Maret 2014. ISSN 2087-933

Undang-undang No 1 tahun 2011 mengenai Perumahan dan kawasan Permukiman.

Buku : Karakteristik Permukiman Kumuh Pesisir.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Mengenai Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh.

Buku : Model Penataan Kawasan Dan Konstruksi Rumah Bermitigasi Bencana Di Kawasan Kumuh Pesisir.

Konsep Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum